

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum Peran Pemerintah

Peran adalah tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dan merupakan pembentuk tingkah laku atau keadaan yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Menurut KBBI, “Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”.¹

Peran yang berkaitan dengan pemerintah didefinisikan sebagai “upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan secara terencana menuju masyarakat modern.” Dari definisi tersebut terlihat bahwa tidak ada satu negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai jenis kegiatan pembangunan harus terus berlanjut karena tingkat kemakmuran, keadilan dan tingkat kesejahteraan rakyat bersifat relatif.²

Melaksanakan tugas pembangunan yang sangat penting dan mulia ini merupakan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat dan bukan tugas pemerintah semata-mata. Akan tetapi meskipun demikian, harus

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

² Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hlm. 142

diakui bahwa pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan nasional.

Sesuai dengan konstitusi setiap negara, demikian pula di Indonesia, bahwa melaksanakan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat adalah salah satu kewajiban negara yang paling utama. Keikutsertaan negara dalam meningkatkan kemakmuran rakyat dapat secara aktif maupun pasif. Kapan negara ikut campur secara aktif dan kapan berlaku pasif tergantung pada konsep perekonomian yang dianutnya.³

Pemerintah melihat penyandang masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan sebagai orang yang mengalami disfungsi sosial (sosial disfunctions). Artinya pemerintah harus dapat menjadi fasilitator dalam mengubah kondisi masyarakat tersebut menjadi berfungsi sosial yakni masyarakat mampu menampilkan peran dan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Si miskin tidak semata-mata ditingkatkan ekonominya tetapi yang lebih penting dilatih diberdayakan dalam wadah kelompok untuk mampu berperan dalam lingkungan sosialnya.⁴

Dalam kaitannya dengan kondisi di atas, maka Pemerintah melalui berbagai elemennya, seperti Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Bappenas serta BUMN juga institusi keuangan bank, melakukan berbagai upaya untuk

³ Ani sri rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 14

⁴Mohammad Mulyadi, *Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan dalam Masyarakat*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016), hal. 234

mewujudkan hal tersebut. Dukungan diwujudkan melalui kebijakan maupun pengadaan fasilitas dan stimulus lain.

B. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)

1. Pengertian Disnakertrans

Departemen Tenaga Kerja sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan pelayanan terhadap tenaga kerja dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai sebagai hasil kerja sama dengan lembaga lembaga latihan yang ada.⁵

Departemen Tenaga Kerja adalah suatu lembaga pemerintah yang mengupayakan setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang dijabarkan dalam tiga tugas pokok yaitu melakukan pelayanan terhadap tenaga kerja dalam rangka persiapan memasuki kerja, pelayanan selama bekerja dan pelayanan setelah tidak bekerja.⁶

Berdasarkan dua pendapat tersebut di atas yang dimaksud dengan Departemen Tenaga Kerja adalah suatu lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengupayakan setiap warga negara dapat bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan melakukan pelayanan kepada tenaga kerja yang akan memasuki dunia kerja, yang sudah bekerja maupun yang

⁵ Endjun Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), hlm 31

⁶ Hayu Dyah Prawesti, Skripsi “*Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam Mengatasi pengangguran*”, (Yogyakarta: eprints.uny.ac.id, 2011), hlm. 23

tidak bekerja, melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga latihan yang ada.

2. Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, tugas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan tugas :

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah.
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.⁷

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, pada Pasal 21 Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah.
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis penempatan tenaga kerja dan perluasan.
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja.
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan.⁸

⁷ <http://kemnaker.go.id/> Di Akses pada 23 Juli 2019

⁸ <http://kemnaker.go.id/> Di Akses pada 23 Juli 2019

C. Tinjauan Umum Pengangguran

1. Definisi Pengangguran

Pengangguran Secara umum dan dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.⁹

Seseorang yang tidak bekerja tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur. Selain itu pengangguran diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan belum dapat memperolehnya.¹⁰ Pengangguran menunjukkan sumber daya yang terbuang. Para pengangguran memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pada pendapatan nasional, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Pencarian pekerjaan yang cocok dengan keahlian mereka adalah menggembirakan jika pencarian itu berakhir, dan orang

⁹ BPS Kabupaten Tulungagung

¹⁰ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hal.

orang yang menunggu pekerjaan di perusahaan yang membayar upah di atas keseimbangan merasa senang ketika lowongan terbuka.¹¹

Angkatan kerja meliputi populasi dewasa yang sedang bekerja atau sedang mencari kerja.¹² Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur. Golongan yang bekerja merupakan sebagian masyarakat yang sudah aktif dalam kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan sebagian masyarakat lainnya yang tergolong siap bekerja dan mencari pekerjaan termasuk dalam golongan menganggur. Golongan penduduk yang tergolong sebagai angkatan kerja adalah penduduk yang berumur di antara 15 sampai 64 tahun.¹³

Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari pekerjaan, atau bisa dikatakan sebagai bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat atau tidak berusaha terlibat dalam kegiatan produksi.¹⁴ Kelompok bukan angkatan kerja ini terdiri atas golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain yang menerima pendapatan.

Pengangguran akan selalu muncul dalam suatu perekonomian karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah adanya proses pencarian

¹¹ Ibid. 141

¹² William A. McEachern, *Ekonomi Makro, pendekatan kontemporer*, terjemahan: Sigit Triandaru, (Jakarta: Salemba Empat. 2000), hal 124.

¹³ Sadono Sukirno. *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000),473

¹⁴ Ibid, 126.

kerja, yaitu dibutuhkannya waktu untuk mencocokkan para pekerja dan pekerjaan. Alasan kedua adalah adanya kekakuan upah. Kekakuan upah ini dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya kebijakan upah minimum, daya tawar kolektif dari serikat pekerja, dan upah efisiensi.¹⁵

Di banyak negara masalah yang sering muncul adalah pengangguran. Penurunan pengangguran selalu menjadi objek utama dalam rencana pembangunan. Pengangguran sendiri adalah penyediaan pasar tenaga kerja yang tidak sesuai dengan permintaan. Jika mekanisme pasar tidak mampu untuk mengatasi masalah ini dan selanjutnya sebagian ahli-ahli ekonomi berpendapat pemerintah perlu menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mengatasinya. Tiga bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan adalah kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan segi penawaran.¹⁶

2. Jenis-jenis Pengangguran

Pengangguran biasanya dibedakan atas 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:

- a. *Pengangguran Normal*, pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.
- b. *Pengangguran structural*, pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.

¹⁵Anwar, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Gowa*. (Makassar: repository.uin-alauddin.ac.id, 2017), hal 13

¹⁶ *Op.Cit.*, hal. 328

- c. *Pengangguran konjungtur*, pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat.¹⁷

Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau bekerja secara tidak optimal. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. *Pengangguran Terbuka (Open Unemployment)*, Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja.
- b. *Pengangguran Terselubung (Disguessed Unemployment)*
Pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu tetap tidak mengurangi jumlah produksi. Pengangguran terselubung bias juga terjadi karena seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya, akhirnya bekerja tidak optimal.
- c. *Setengah Menganggur (Under Unemployment)* Setengah menganggur ialah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Ada yang

¹⁷ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern*. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012), hal. 8-9

mengatakan bahwa tenaga kerja setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau kurang dari 7 jam sehari. Misalnya seorang buruh bangunan yang telah menyelesaikan pekerjaan di suatu proyek, untuk sementara menganggur sambil menunggu proyek berikutnya.¹⁸

Pengangguran terbuka biasanya terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Ada kecenderungan mereka yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha mencari kerja sesuai dengan aspirasi mereka. Aspirasi mereka biasanya adalah bekerja di sektor modern atau di kantor. Untuk mendapatkan pekerjaan itu mereka bersedia menunggu untuk beberapa lama. Tidak tertutup kemungkinan mereka berusaha mencari pekerjaan itu di kota atau di provinsi atau daerah yang kegiatan industry telah berkembang. Ini yang menyebabkan angka pengangguran terbuka cenderung tinggi di kota atau daerah yang kegiatan industry atau sektor modern telah berkembang.¹⁹

Sebaliknya angka pengangguran terbuka rendah di daerah atau provinsi yang kegiatan ekonomi masih bertumpu pada sektor pertanian. Apalagi tingkat pendidikan di daerah tersebut rendah. Pada umumnya, mereka yang berpendidikan rendah bersedia bekerja apa saja untuk menopang kehidupan. Bila sektor pertanian kurang dapat menjamin

¹⁸S. Mulyadi, *Ekonomi Sumberdaya Manusia dalam perspektif Pembangunan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008) hlm. 60

¹⁹ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), 230-231.

kelangsungan hidup, mereka bersedia berusaha di kantor informal. Mereka tidak memperdulikan apakah jam kerja panjang atau penghasilan rendah. Bagi mereka yang penting dapat bertahan hidup.

3. Faktor-faktor Pengangguran

a. Kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat

Banyak kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat dan menimbulkan pengangguran baru, Menurut Menakertrans, kenaikan BBM kemarin telah menambah pengangguran sekitar 1 juta orang. Kebijakan Pemerintah yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi bukan pemerataan juga mengakibatkan banyak ketimpangan dan pengangguran. Banyaknya pembukaan industri tanpa memperhatikan dampak lingkungan telah mengakibatkan pencemaran dan mematikan lapangan kerja yang sudah ada.

b. Pengusaha yang selalu mengejar keuntungan

Dengan menerapkan sistem pegawai kontrak (outsourcing) Perusahaan-perusahaan saat ini lebih sering menerapkan sistem tersebut karena dinilai lebih menguntungkan mereka. Apabila mempunyai pegawai tetap, mereka akan dibebankan pada biaya tunjangan ataupun dana pension kelak ketika pegawai sudah tidak lagi bekerja. Namun dengan sistem pegawai kontrak ini, mereka bisa seenaknya mengambil pegawainya ketika butuh atau sedang ada proyek besar dan kemudian membuangnya lagi setelah proyek

tersebut sudah berakhir. Dan tentunya hal ini akan membuat perusahaan tidak perlu membuang biaya besar. Namun sistem ini membuat munculnya pengangguran.

c. Faktor keahlian Zaman sekarang,

Diperlukan manusia yang kreatif dan inovatif. Meskipun hanya lulusan SLTA, jika seseorang itu mempunyai keahlian dan keterampilan, maka orang tersebut bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Tetapi, masyarakat Indonesia pada umumnya malas untuk bekerja keras, bekerja dari nol, maka karena itu pula pengangguran tercipta.²⁰

4. Dampak Buruk Pengangguran

Pengangguran adalah masalah publik yang mempunyai dampak buruk bagi masyarakat. Beberapa akibat buruk dari pengangguran dibedakan kepada dua aspek dimana dua aspek tersebut yaitu:²¹

a. Akibat buruk ke atas kegiatan perekonomian

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari memperlihatkan berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran.

²⁰ Anwar..... hal.13

²¹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 514

Akibat-akibat buruk tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1) Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.
- 2) Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit. Jika penerimaan pajak rendah, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.
- 3) Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang pertama, pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan keuntungan kelesuan berkurang. Kegiatan Keuntungan

perusahaan yang rendah menyebabkan mengurangi keinginan untuk melakukan investasi.

b. Akibat buruk ke atas individu dan masyarakat

Pengangguran akan mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat. Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran adalah :

- 1) Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencarian dan pendapatan.
- 2) Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan suatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek.
- 3) Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah.

5. Usaha menanggulangi pengangguran

Terdapat beberapa cara untuk mengatasi pengangguran antara lain :²²

- a. Menciptakan penghasilan sendiri

²² Geoffrey G. Meredith, Robert E. Nelson, Philip A. Neck, *Kewirausahaan: Teori dan Praktek*. (Jakarta: Viktory Jaya Abadi, 2002), hal.271

Salah satunya dengan mengubah bentuk benda yang tidak berguna menjadi bentuk yang lebih berguna bagi masyarakat. Hal ini akan memberikan nilai tambah atas hasil dari benda tersebut. Contohnya sampah merupakan benda yang tidak berguna. Namun jika sampah tersebut diubah, misalnya sampah daun diubah menjadi pupuk kompos dan pupuk tersebut dikemas pada kantong plastik dan siap dijual. Maka pupuk memiliki nilai tambah atas hasil sebesar harga jualnya.

b. Perlu pengembangan wirausaha

Salah satunya melalui Kementrian Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, dimana merupakan suatu lembaga yang berperan penting dalam memperdayakan tenaga-tenaga pada usia kerja yang masih menganggur menjadi tenaga yang produktif. Untuk mengurangi pengangguran Balai latihan kerja memberikan berbagai keterampilan dan keahlian, seperti pembekalan menjahit, salon, komputer, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

c. Pemerintah

Pemerintah sangat berperan dalam menanggulangi pengangguran. Dalam pengentasan pengangguran dan kemiskinan pada dasarnya tidak dapat diselenggarakan hanya oleh pemerintah saja, akan tetapi perlu partisipasi dari seluruh masyarakat. Salah satu sebagai contoh program pemerintah dalam mengatasi pengangguran

yaitu dengan memberikan dana pembiayaan yang berasal dari pemerintah, pinjaman kredit usaha rakyat (KUR).²³

Pemerintah semakin tertarik untuk membantu sektor-sektor usaha kecil. Selain itu perusahaan-perusahaan kecil dapat bergabung untuk memperoleh tender dari kontrak pemerintah. Pemerintah sadar bahwa perusahaan kecil harus mampu bersaing dengan perusahaan besar. Perusahaan kecil haruslah menunjukkan perhatiannya pada pemerintah, sebelum pemerintah dapat memberikan bantuan kepada perusahaan-perusahaan besar. Sayangnya, para pengusaha kecil biasanya enggan untuk mengorganisasi dan mengemukakan kebutuhan-kebutuhan mereka kepada pemerintah.

Pemerintah berharap adanya partisipasi para pengusaha sehingga pengangguran bisa dikurangi. Pemerintah sangat berharap hal ini dapat berkembang dengan pesat sehingga biarpun tidak bisa memberikan kesempatan kerja kepada semua pengangguran, minimal sebagian dari mereka dapat tertampung. Dan pemerintah menginginkan agar pengusaha dapat turut andil mendidik jiwa kewirausahaan dengan cara memberikan suatu bimbingan teknis dan permodalan kepada para pengangguran sehingga mereka tidak

²³ Sudradjad, *Kiat Mengentaskan Pengangguran dan Kemiskinan Melalui Wirausaha*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hal. 11

hanya memfokuskan diri untuk menjadi karyawan perusahaan atau menjadi pegawai negeri.²⁴

D. Tinjauan Umum Tenaga Kerja

Jumlah penduduk yang makin besar telah membawa akibat jumlah angkatan yang besar pula. Ini berarti makin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. agar dapat mencapai keseimbangan maka mereka semua harus tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan ketrampilan mereka.

Dengan demikian pembangunan ekonomi sangat diperlukan untuk memperkecil tingkat pengangguran. Dengan pembangunan ekonomi diharapkan laju pertumbuhan ekonomi dapat selalu dipertahankan pada tingkat yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk, sehingga kegiatan perekonomian akan mejadi lebih luas dan selanjutnya dapat memperkecil jumlah orang yang menganggur.

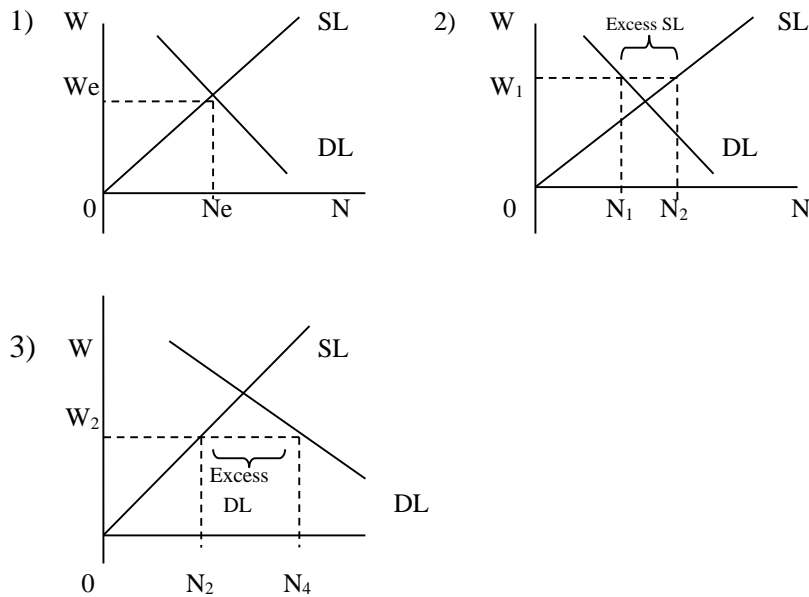
1. Teori ketenagakerjaan

Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja (*demand for labour*), pada suatu tingkat upah. Ketidakseimbangan tersebut dapat berupa:(a) lebih besar penawaran dibanding permintaan terhadap tenaga kerja (adanya *excess supply of labour*) dan, (b) lebih

²⁴ Soejitno Irmim, Abdul Rochim, *Menuju Bisnis Yang Islami*. (Jakarta :SeyMedia, 2006), hal. 91

besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (adanya *excess demand for labour*).²⁵

Gambar 2.1
Ketidakseimbangan Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja



Keterangan:

SL = Penawaran Tenaga Kerja (*supply of labor*)

DL = Permintaan Tenaga Kerja (*deman fot labor*)

W = Upah Riil

N = Jumlah Tenaga Kerja

Penjelasan gambar:

- 1) Jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk bekerja adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang diminta, yaitu masing-masing sebesar N_e pada tingkat upah keseimbangan W_e . Titik keseimbangan dengan demikian adalah titik E. Di sini tidak ada *excess supply of labor* maupun *excess demand for labor*. Pada

²⁵ S. Mulyadi, *Ekonomi Sumberdaya Manusia dalam perspektif Pembangunan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008) hal. 57

tingkat upah keseimbangan W_e maka semua orang yang ingin bekerja telah dapat bekerja. Berarti tidak ada orang yang menganggur. Secara ideal keadaan ini disebut *full employment* pada tingkat upah W_e tersebut.

- 2) Pada gambar kedua terlihat adanya *excess supply of labor*. Pada tingkat upah W_1 penawaran tenaga kerja (SL) lebih besar daripada permintaan tenaga kerja (DL). Jumlah tenaga kerja yang menawarkan dirinya untuk bekerja adalah sebanyak N_2 sedangkan yang diminta hanya N_1 . Dengan demikian ada orang yang menganggur pada tingkat upah W_1 ini sebanyak $N_2 - N_1$.
- 3) Pada gambar ketiga terlihat adanya *excess demand for labor*. Pada tingkat upah W_2 permintaan akan tenaga kerja (DL) lebih besar daripada penawaran tenaga kerja (SL). Jumlah orang yang menawarkan dirinya, untuk bekerja pada tingkat upah W_2 adalah sebanyak N_3 orang, sedangkan yang diminta adalah sebanyak N_4 orang.

2. Konsep Ketenagakerjaan

Beberapa pengertian yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, yaitu:²⁶

a. Tenaga Kerja (*manpower*)

Adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

²⁶ *Ibid.* hlm. 59-60

b. Angkatan Kerja (*labor force*)

Adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu produksi barang dan jasa.

c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*Labor force participation rate*).

Adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umum sebagai persentase penduduk dalam kelompok umur tersebut.

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Tenaga Kerja}} \times 100\%$$

Pertumbuhan penduduk akan sangat mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja. Semakin besar jumlah penduduk usia kerja, maka secara otomatis jumlah angkatan kerja akan bertambah. Semakin tinggi TPAK semakin baik, karena itu berarti partisipasi angkatan kerja semakin meningkat. Bila peningkatan angkatan kerja seiring dengan bertambahnya partisipasi penduduk yang bekerja, hal ini dapat berarti peningkatan TPAK diiringi dengan menurunnya partisipasi penduduk yang bekerja ini pertanda bahwa pemicu tingginya TPAK adalah katnya penduduk yang mencari pekerjaan. Dengan cara mengakibatkan bertambahnya pengangguran.

d. Tingkat Pengangguran (*Unemployment rate*)

Adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Pengertian menganggur di sini adalah aktif mencari pekerjaan.

$$TP = \frac{\text{Jumlah Orang Mencari Pekerjaan}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

E. Penelitian Terdahulu

Telah banyak karya-karya penelitian yang membahas Tentang peran Disnakertrans dalam mengurangi pengangguran baik berupa jurnal, skripsi, thesis, antara lain:

Jurnal oleh Jeffri Chandra Irvanto²⁷, dengan judul “Peran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Kota Samarinda”, (Samarinda: *ejournal.ipfisip-unmul*, ISSN 2477-2631, 2017). Hasil penelitian ini mendeskripsikan (1). Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) melakukan penempatan tenaga kerja dengan pelayanan mendata para calon tenaga kerja yang ingin mencari kerja lewat informasi pasar kerja. (2). Disnaker menjadi penengah antara tenaga kerja dan perusahaan agar tenaga kerja bisa mendapatkan pekerjaan, perusahaan juga bisa mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan yang kebutuhan perusahaan. (3). Perluasan kerja dilakukan dengan Program padat karya ini sangat baik karena membantu

²⁷ Jeffri Chandra Irvanto, *Peran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Kota Samarinda*. (Samarinda: *ejournal.ipfisip-unmul*, ISSN 2477-2631, 2017) di akses pada 7 Agustus 2019

memberikan pekerjaan kepada tenaga kerja yang ada di daerah pedesaan, pekerjaan yang mereka lakukan dalam kegiatan padat karya adalah seperti membangun jalan. Tetapi kegiatan ini hanya bersifat sementara dan tidak berkelanjutan sehingga akan berpotensi untuk menimbulkan masalah pengangguran kembali. (4). Pelatihan tenaga kerja dapat dikatakan program yang dapat meningkatkan kualitas dari tenaga kerja itu sendiri. Namun dalam melakukan pelatihan Dinas Tenaga Kerja harus meniadakan kegiatan tersebut karena tidak adanya anggaran. (5). Kendala-kendala untuk menjalankan peran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dalam mengurangi tingkat pengangguran di Kota Samarinda yaitu tidak adanya anggaran sehingga Disnaker tidak bisa melakukan kegiatannya dan Program Padat Karya hanya dilakukan di Daerah Pedesaan.

Jurnal oleh Fadhil Ikhwan Haulian, dengan judul Evaluasi Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Penyaluran Tenaga Kerja Di Kota Samarinda (Samarinda, eJournal Administrasi Negara, Volume 5 , Nomor 1 , 2017: 5378 - 5392 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id). hasil penelitian ini mendeskripsikan Pelaksanaan program dan pelatihan kerja Dalam proses pelaksanaan program dan pelatihan kerja Dinas Tenaga Kerja kota Samarinda hanya sebagai fasilitator dengan tidak memiliki instruktur tetap sehingga Dinas Tenaga Kerja kota Samarinda membutuhkan kerja sama dari lembaga pelatihan kerja atau lembaga latihan swasta di kota Samarinda. Dalam penempatan tenaga kerja yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dari tahun 2013-2015 dikarenakan jumlah

permintaan tenaga dan peluang kerja yang cukup besar dan pemanfaatan keunggulan dari program program yang memfasilitasi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. dalam penyaluran tenaga kerja adalah kurangnya kesadaran dari perusahaan yang telah menerima tenaga kerja untuk melaporkan kembali AK/I kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, kurangnya kesadaran dari pencari kerja untuk melaporkan AK/I apabila selama 6 bulan belum mendapatkan pekerjaan, serta lowongan pekerjaan yang menyertakan kriteria telah memiliki pengalaman sehingga pencari kerja yang belum memiliki pengalaman kesulitan memiliki pekerjaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan Pulungan Parapak, Muhammad Noor, dan Rita Kala Linggi²⁸ yang berjudul “Upaya Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Kutai Timur”. Penelitian ini berisi mengenai strategi yang dilakukan oleh Dinas yaitu meliputi pemberian informasi mengenai kesempatan kerja melalui majalah dinding (Mading), media cetak (Website Resmi), pemberian pelatihan berbasis kewirausahaan dan kompetensi. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi yang berhubungan dengan upaya mengatasi pengangguran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

²⁸ Kurniawan Pulungan Parapak dkk, *Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Mengatasi Pengangguran di Kabupaten Kutai Timur*. eJournal Ilmu Pemerintah. Vol.6 No.1 dalam <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>. Diakses pada 6 Agustus 2019

Penelitian yang dilakukan oleh Hermes Saroha Butar Butar²⁹ yang berjudul "Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Masalah Pengangguran Di Kota Pekanbaru". Penelitian ini berisi tentang Strategi Dinas Tenaga Kerja dalam Mengatasi Masalah Pengangguran di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal. Melihat landasan hukum yang kuat untuk menempatkan tenaga kerja lokal dengan mengatasi masalah pengangguran di Kota Pekanbaru, namun ada beberapa faktor yang masih belum bisa berjalan dengan baik berupa rendahnya minat mengisi lowongan pekerjaan diluar daerah, tidak tersedianya lapangan pekerjaan, tidak mempunyai keahlian dan keterampilan serta masuknya penduduk luar untuk mencari pekerjaan menjadi penghambat kinerja Dinas Tenaga Kerja dalam mengatasi masalah pengangguran di Kota Pekanbaru.

Penelitian yang dilakukan oleh Harlik, Amri Amir dan Hardiani³⁰ yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Dan Pengangguran". Penelitian ini berisi tentang faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan dan pengangguran serta hubungan yang terjadi antara kemiskinan dengan pengangguran serta bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut. Persamaan penelitian Harlik dengan peneliti adalah mengenai upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Harlik

²⁹Hermes Saroha Butar Butar, *Strategi Dinas Tenaga Kerja dalam Mengatasi Masalah Pengangguran di Kota Pekanbaru*. jurnal JOM FSIP Vol.2 No.2 dalam <https://media.neliti.com>. Diakses pada 7 Agustus 2019

³⁰ Harlik dkk, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran, Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. Vol. 1 No. 2 dalam <https://media.neliti.com>. diakses pada 6 Agustus 2019

yaitu tentang pembahasan mengenai kemiskinan dan hubungan dari kemiskinan dengan pengangguran itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Karimovic Kautsar³¹, yang berjudul “Analisis Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dalam Mengurangi Pengangguran (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman Tahun 2016)”. Penelitian ini berisi tentang peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar kerja dengan mengadakan pelatihan mobile training unit, pelatihan institusional dan pelatihan swadana dan juga mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja dengan mengadakan bursa kerja.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Jeffri	Peran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Kota Samarinda	a. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. b. Penelitiannya pada penempatan dan perluasan kesempatan kerja di Disnakertrans	a. Pembahasan lebih luas b. Penelitiannya juga pada pelatihan oleh BLK Disnakertrans
2.	Fadhil	Evaluasi Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam	a. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif.	a. Membahas tentang pelatihan dan penempatan tenaga kerja

³¹ Karimovic Kautsar, Analisis Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dalam Mengurangi Pengangguran (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman Tahun 2016), ejournal Ilmu Sosial dan Politik, diakses pada tanggal 7 Agustus 2019

		Penyaluran Tenaga Kerja Di Kota Samarinda	b. Penelitiannya Juga membahas strategi Disnakertrans dalam mengurangi pengangguran	
3.	Kurniawan Dkk	Upaya Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Kutai Timur	a. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif b. penelitiannya pada upaya disnakertrans dalam mengurangi pengangguran	a. fokus penelitiannya yaitu membahas mengenai pemberian informasi mengenai kesempatan kerja dan pemberian pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja
4.	Karimovic Kautsar	Analisis Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dalam Mengurangi Pengangguran (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman Tahun 2016)	a. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. b. Sama sama menganalisis strategi pengangguran dalam mengurangi pengangguran	a. Penelitiannya hanya berfokus pada strategi disnakertrans sedangkan peneliti berfokus pada pengangguran
5.	Hermes	Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Masalah Pengangguran	a. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. b. Penelitiannya Juga membahas strategi	a. Penelitiannya tidak menfokuskan pada penempatan dan perluasan

		Di Kota Pekanbaru	Disnakertrans dalam mengurangi pengangguran	kesempatan kerja
--	--	----------------------	--	---------------------